

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

*ANALYSIS OF CASH REVENUE ACCOUNTING SYSTEM IN SERVICE REVENUE
MINAHASA SOUTHEAST DISTRICT*

Gabriela S. Lantang¹, Herman Karamoy², Jessy Warongan³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi Manado 95115. Indonesia

Email : gabrielalantang@gmail.com

ABSTRAK

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem akuntansi penerimaan kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penerimaan kas di DISPENDA Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan Permendagri 21 Tahun 2011 dan PP 71 Tahun 2010 namun masih terkendala dengan terbatasnya sumber daya manusia dalam menjalankan sebagian bidang dari DISPENDA. Pemerintah Minahasa Tenggara sebaiknya merekrut orang-orang yang mampu mengatasi permasalahan sumber daya manusia yang masih kurang atau melakukan pelatihan / pendidikan teknis untuk DISPENDA tersebut.

Kata Kunci : Sistem Akuntansi, Penerimaan Kas

ABSTRACT

The efficiency and effectivity of local governance needs to be improved within more attention to the relationship aspects between the local government structure, the potential and diversity of the regions, the opportunities and challenges of global. Competition by giving authority to the widest area accompanied by the granting of right and obligations held regional autonomy in the unity of the governance system. This study aim to analyze the accounting system of cash receipts revenue (PAD) in north minahasa. The method used is descriptive qualitative method. The application of the system of cash receipts in DISPENDA southeast minahasa regency in accordance with government regulation 21 of 2011 and regulation 71 of 2010 still constrained by the limited of human resources to running portion in DISPENDA. Southeast minahasa government shall recruit the people who are be able to overcome the problem of lacking human resources or do training/technical education for DISPENDA.

Keyword : Sistem Of Accounting, Cash Receipt

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerimaan kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting didalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro dibank yang tidak dibatasi penggunaannya. Perubahan kas dipengaruhi oleh 2 aktivitas yaitu: penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas meliputi transaksi – transaksi yang mengakibatkan bertambahnya saldo kas tunai dan atau rekening bank milik entitas pemerintah daerah, baik yang berasal dari pendapatan tunai, penerimaan piutang, penerimaan transfer, penerimaan pinjaman, maupun penerimaan lainnya. Kas dapat mengatur penerimaan dan pengeluaran uang dalam kegiatan. Bahkan bisa juga memperhitungkan keuangan yang akan datang. Begitu banyaknya fungsi dan kegunaan kas. Dengan adanya kas maka bisa mengetahui proses terjadinya pengelolaan uang.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP memberikan deskripsi yang cukup jelas mengenai pendapatan. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah “ untuk mengetahui sistem akuntansi penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sudah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 21 Tahun 2011.”

Tinjauan Pustaka

Konsep Akuntansi

Menurut Weygandt, Kimmel, Kieso (2011) akuntansi adalah system informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi untuk pengguna yang tertarik. Nordiawan (2011) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari suatu lembaga atau perusahaan yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif tindakan.

Akunansi Sektor Publik

Menurut Wiratna (2015) Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya. Suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan memakai ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (American Accounting Association, 1966 dalam Halim dan Kusufi, 2013).

Peran Akuntansi |Sektor Publik

Menurut Mahmudi (2011) Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan. Akuntansi dibutuhkan pada setiap jenis organisasi baik sektor bisnis, sektor publik maupun sektor sosial. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik antara lain : Pengelolaan keuangan Negara, Pelaporan keuangan, Pemeriksaan, Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mahmudi (2011) Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan konstitusi negara. Organisasi sektor publik pada umumnya berupa lembaga-lembaga negara atau pemerintahan atau organisasi yang memiliki keterkaitan dengan keuangan negara. Dalam kutipan Mahmudi (2011) menyatakan organisasi sektor publik sangat luas cakupannya, bervariasi, dan bergerak dalam lingkungan yang kompleks. Suatu organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi sektor publik jika memenuhi karakteristik berikut ini :

1. Organisasi bergerak dalam penyediaan barang dan pelayanan publik,
2. Organisasi berasosiasi dengan pemerintah atau terkait dengan penyelenggaraan Negara,
3. Organisasi bukan milik pribadi atau sekelompok orang tetapi menjadi milik publik atau milik Negara.

Standar Akuntansi Sektor Publik

Menurut Hariadi, *et al.* (2010) Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak yang di luar organisasi. Dalam akuntansi sektor publik sendiri dikenal akuntansi pemerintahan, dalam akuntansi pemerintahan ini data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Karena akuntansi keuangan pemerintah menghasilkan informasi bagi pihak intern maupun ekstern pemerintah, sehingga dapat digolongkan sebagai akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan direncanakan, diorganisasikan, serta dijalankan atas dasar dana.

Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintahan daerah, yayasan,

partai politik, perguruan tinggi, dan organisasi-organisasi non profit lainnya (Monir Mir dan Wahyu Sutiyono, 2013). Sektor publik, lingkungannya cukup kompleks meliputi multi entitas ekonomi dan legal yang beraneka ragam dengan latar belakangnya

Teori Akuntansi dan Organisasi Sektor Publik

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006, akuntansi sektor publik adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan sektor publik. Kelompok organisasi sektor publik dapat dibagi dalam :

1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD)
4. Badan Umum Non Departemen
5. Yayasan
6. Koperasi
7. Perkumpulan/Asosiasi, seperti organisasi KADIN (Konsul Dagang dan Industri) dan
8. Ikatan Akuntansi Indonesia.
9. Hubungan akuntansi dan organisasi sektor publik dapat dibedakan sebagai berikut :
10. Berorientasi Laba (contoh BUMN) Organisasi yang bertujuan memperoleh laba
11. Berorientasi Non Laba tipe A contoh : BUMN, Perum, dan Pemerintah (Lembaga Otonom), Organisasi yang sumber keuangannya diperoleh dari pendapatan penjualan barang dan jasa.

Ditipe 1, organisasi sektor publik akan mengikuti pola dasar. Ini berarti kecenderungan keprilaku swasta amat tinggi. Tipe 1 sering disebut grey area antar sektor publik dan sektor swasta. Ditipe 2 organisasi sektor publik biasanya mengikuti peraturan akuntansi di sektor publik.

Laporan Keuangan Sektor Publik

Akuntabilitas adalah konsep penting dimana konsep ini memiliki dampak terhadap semua aspek operasional pemerintah, hal yang menggaris bawahi adalah akuntansi untuk pelaporan, penjelasan dan justifikasi aktivitas dan pertanggungjawaban terhadap hasil yang dicapai. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik, informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik

Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Deddy Nordiawan dan Ayuningtyas (2010) dalam buku "Akuntansi Sektor Publik menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut :

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*compliance and stewardship*). Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*). Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.

3. Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*). Laporan keuangan berfungsi memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa mendatang. Laporan keuangan berfungsi memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan data.
4. Kelangsungan organisasi (*viability*). Laporan keuangan berfungsi membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa mendatang.
5. Hubungan masyarakat (*public relation*). Laporan keuangan berfungsi memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figure*). Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Hubungan keuangan antar tingkatan pemerintah paling sedikit mencakup, antara lain : Pembagian kewenangan Pendapatan (Perpajakan), Sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan vertikal (kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah), Sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan horizontal (ketimpangan fiskal antar daerah).

Pengertian Sistem dan Prosedur

Menurut Diana dan Setiawati (2011) pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut “suatu sistem adalah serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”. Sedangkan prosedur didefinisikan sebagai berikut “suatu uraian kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang – ulang. Dengan pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat.

Pengertian Sistem Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Akuntansi menurut Diana dan Setiawati (2011) adalah formulir – formulir, catatan – catatan, prosedur – prosedur dan alat – alat yang digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan suatu usaha kesatuan ekonomis bertujuan untuk umpan balik dalam bentuk laporan – laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak lainnya yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga – lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi. Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan.

Akuntansi Keuangan Daerah Secara Umum

Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian – kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil – hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanjung (2012).

Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur – prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD). Menurut Abdul Halim (2010) prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan / atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan / atau SKPKD.

Landasan Empirik

Mawei (2012) dengan judul Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Dinas Perhubungan Kota Manado. Bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana menganalisis proses pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas serta penetapan kebijakan akuntansi yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Manado sebagai acuan / pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya telah sesuai dengan SE.900/316/BAKD dan PP No 24 Tahun 2005. menunjukkan bahwa sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Perhubungan Kota Manado secara umum baik sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 yang penjabarannya pada Surat Edaran Nomor SE.900/316/BAKD walaupun masih terdapat beberapa kelemahan dalam menjalankan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.

Pangalila (2015) dengan judul Analisis sistem dan prosedur penerimaan kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara. untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan kas PAD pada Kabupaten Minahasa Utara sudah memadai dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan namun masih terkendala dengan terbatasnya sumber daya manusia dalam menjalankan sebagian bidang dari DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara.

Mawikere (2016) dengan judul Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Retribusi Kebersihan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Penerimaan Retribusi Kebersihan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Menunjukkan bahwa sistem dan prosedur Penerimaan Retribusi Kebersihan Daerah telah sesuai dengan PERMENDAGRI NO. 59 Tahun 2007.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kuncoro (2014) mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk menyiapkan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu di Kabupaten Minahasa Tenggara yang adalah salah satu Kabupaten di antara 15 Kabupaten/Kota (11 Kabupaten dan 4 Kota) yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Ibukota Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Ratahan, berjarak sekitar 80 km dari Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa Tenggara secara administratif telah ditetapkan dengan UU No. 9 tahun 2007 di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Agustus sampai dengan selesai.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengambilan data sesuai permasalahan yang di angkat.
2. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait, serta dokumentasi berupa pengambilan data-data di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menganalisis sistem penerimaan kas yang ada di Dispenda.
3. Mengelolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Metode Pengumpulan Data

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data kualitatif mengenai Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Pada Dinas Perhubungan Kota Manado. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa gambaran umum, visi, misi, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi, serta data aset dan jumlah aset yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Manado

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data atau keterangan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mendukung penelitiannya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik ini dilakukan dengan melaksanakan wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh yaitu sistem dan prosedur akuntansi aset serta data aset dan jumlah aset yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Manado dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Seiring dengan hadirnya DISPENDA Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan harapan yang ingin dicapai adalah terwujudnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah yang akuntabel dengan berorientasi pada pelayanan prima. Dinas Pendapatan Daerah adalah unit organik daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepada Dinas dibantu oleh seorang sekretaris dan kepala-kepala bidang.

Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Tabel 1 Analisis Sistem Penerimaan Kas Pada DISPENDA Kabupaten Minahasa Tenggara Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011

No.	Keterangan	Hasil
1.	Penerimaan Kas Melalui Bendahara Penerimaan	Telah Sesuai. Dalam hal ini, penerimaan kas melalui bendahara penerimaan pada DISPENDA minahasa tenggara telah sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
2.	Penerimaan Kas Melalui Bendahara Pembantu	Telah Sesuai Dalam hal ini penerimaan kas melalui bendahara penerimaan pembantu pada DISPENDA minahasa tenggara telah sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
3.	Penerimaan Kas Melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, Lembaga Keuangan, dan / atau kantor pos.	Belum Sesuai Dalam Hal ini kurangnya informasi oleh wajib pajak mengenai pembayaran melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, Lembaga Keuangan dan / Kantor pos.
4.	Pertanggung jawaban bendahara penerimaan.	Telah Sesuai Dalam Hal ini Pertanggung jawaban bendahara penerimaan telah sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
5.	Pertanggung jawaban bendahara penerima pembantu	Telah sesuai. Dalam Hal ini Pertanggungjawaban bendahara penerima pembantu telah sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011

Sumber: Pemda Mitra, 2016

Berdasarkan dengan tabel 1 di atas diketahui bahwa Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara secara umum telah sesuai akan tetapi secara khusus untuk Penerimaan Kas Melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, Lembaga Keuangan dan atau kantor pos masih kekurangan informasi untuk masyarakat atau wajib pajak.

Pembahasan

Sistem akuntansi penerimaan kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas, Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011, pelaksanaan penerimaan kas dilakukan melalui prosedur penerimaan STS yang dikeluarkan oleh Bank dan selanjutnya dikirimkan ke fungsi yang melaksanakannya. Karena itu peraturan daerah yang berkaitan dengan sistem dan prosedur harus dirancang sedemikian rupa dan secara hati-hati supaya antara ketentuan satu dengan yang lainnya dapat saling berkesesuaian secara efisien dan efektif. Untuk itulah pada bagian ini penulis akan mencoba menganalisis sistem penerimaan kas pada Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya bagian keuangan Bendahara Penerimaan apakah penerimaan sudah sesuai dengan sistem dan prosedur yang tertuang dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011, ataukah belum. Analisis tersebut ialah analisis terhadap sistem akuntansi penerimaan kas.

Menurut penelitian yang didapatkan di lapangan, melalui wawancara dengan sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor DISPENDA Kabupaten Minahasa Tenggara yang selanjutnya di setor ke rekening kas umum daerah. Dengan mekanisme pembayaran untuk PBB-P2 dikumpulkan oleh masing-masing lurah dan di catat oleh sekretaris desa dan dibayar langsung ke Bendahara Penerimaan. Jika disesuaikan dengan dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Pasal 308 dan pasal 309 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka hasil temuan yang didapatkan dari peneliti.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara menggunakan sistem dan prosedur penerimaan melalui Bendahara Penerimaan dengan sistem dan prosedur penerimaan daerah melalui Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:

1. Pengguna anggaran menyerahkan SKP Daerah kepada wajib pajak dan bendahara penerimaan.
2. Wajib pajak membayarkan uang kepada Bendahara Penerimaan sejumlah yang tertera di SKP Daerah.
3. Bendahara Penerimaan memverifikasi uang yang diterimanya dengan SKP Daerah dari pengguna anggaran.
4. Jika sesuai maka Bendahara Penerimaan membuat dokumen STS dan Surat tanda bukti pembayaran / bukti lain yang sah.
5. Bendahara Penerimaan menyerahkan surat tanda bukti bukti pembayaran/ bukti lain yang sah kepada wajib pajak dan STS beserta uang kepada bank.
6. Bank mengotorisasi STS dan menerbitkan nota kredit. Bank mengembalikan STS bendahara Penerimaan. Nota kredit disampaikan ke BUD.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Setelah menganalisis sistem akuntansi penerimaan kas di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Sistem penerimaan kas di DISPENDA Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan PP No. 71 Tahun 2010.
2. Dalam hal prosedur penerimaan kas berupa Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang sah telah dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur yang disarankan dalam peraturan perundang-undangan.

Saran

Dari hasil penelitian, yang menjadi saran dari peneliti adalah:

1. Dinas Pendapatan Daerah perlu melaksanakan pelatihan / pendidikan teknis kepada pegawai-pegawainya, untuk mengetahui kurangnya SDM pegawai dibidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk menambah pemahaman teknis terhadap sistem penerimaan kas yang dilakukan oleh DISPENDA Kabupaten Minahasa Tenggara, penulis menyarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut diperhatikan sistem dan prosedur dalam hal penerimaan kas pajak

daerah, untuk di buat kan gambar/iklan tentang mekanisme pembayaran agar mudah dipahami kepada setiap masyarakat yang mendatangi langsung kantor DISPENDA Kabupaten Minahasa Tenggara.

3. Agar Dispenda Kabupaten Minahasa Tenggara bisa menyediakan Informasi melalui Internet agar mudah di akses masyarakat dan informasi yang didapatkan bisa lebih mudah.
4. Karena minimnya informasi mengenai sistem dalam akuntansi pemerintah, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain yang berhubungan, seperti sistem pengeluaran kas, sistem pengadaan persediaan dan aset, yang dapat memberikan manfaat lebih lanjut mengenai /sistem akuntansi yang berhubungan dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam Jurnal

- [1]. Mawei, Meliza Chintia :2012. “Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kaspada Dinas Perhubungan Kota Manado”.
- [2]. Mawikere, Lora Mona 2016 Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Retribusi Kebersihan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun 2016.
- [3]. Mir, Monir and Sutiyono, Wahyu. 2013, Public Sector Financial Management Reform: A Case Study of Local Government Agencies in Indonesia, Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 7(4), 97-117. Available at:<http://ro.uow.edu.au/aabfj/vol7/iss4/7>
- [4]. . Pangalila, Chartika Melisa. 2015, Analisis sistem dan prosedur penerimaan kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Volume 15 No. 04 Tahun 2015.
- [5]. Panambunan, Greivy. 2016. *Evaluasi Pengendalian Internal dalam Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara*. Jurnal Emba. Vol.4 No.1 Maret 2016. Hal. 907-915. ISSN 2303-1174.

Buku

- [1]. Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2011. Sistem Informasi Akuntansi. Andi. Yogyakarta.
- [2]. Halim Abdul, Konsufi Muhammd Syam, 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- [3]. Hariadi, Pramono, Restianto Yanuar, Bawono, Icuk Rangga. 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- [4]. Kuncoro, Mudrajad, 2014. Metode Riset Untuk Bisnis, dan Ekonomi. Edisi 4 Erlangga. Jakarta.
- [5]. Mahmudi, 2011, Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama, Yogyakarta. UUI Press.10
- [6]. Nordiawan, Deddy 2011. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta
- [7]. Nordiawan Deddy, Hertiaty Ayuningtyas, (2009), Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat. Jakarta
- [8]. Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2011). Financial Accounting. (IFRS edition). The United State of America: John Wiley and Sons, Inc.
- [9]. Tanjung, Abdul. 2012. Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua. Alfabet, Bandung.
- [10]. Wiratna Sujarweni, 2015. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Pustaka Baru Press Yogyakarta.